

**MEKANISME EKSEKUSI PUTUSAN HAK UJI MATERIL PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG**

**EXECUTION MECHANISM OF MATERIAL TESTING RIGHTS
LEGISLATION REGULATIONS UNDER LAW**

**EKA JAZILLAH
NPM 183112330040228**

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
2022**

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi :

"MEKANISME EKSEKUSI PUTUSAN HAK UJI MATERIIL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG".

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim Pengaji pada tanggal 26 Agustus 2022 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 81,3 (delapan puluh satu koma tiga) dan predikat CUM LAUDE.

Jakarta, 08 September 2022

Mengetahui,

Dekan,

(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.)

Pembimbing,

(Dr. Ismail Rumadhan, M.H.)

(Dr. H. Chandra Tirta, S.H., M.H.)

(Dr. Ismail Rumadhan, M.H.)

(Dr. Hamrin, S.H., M.H., M.Si (Han))

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Jazillah

Tempat dan Tanggal Lahir : 30 November 1999

Nomor Pokok Mahasiswa : 183112330040228

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Nasional

Alamat : Kp. Gusti kb. Pala rt. 003 Rw. 014 no. 2 Jakarta Utara

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul "**MEKANISME EKSEKUSI PUTUSAN HAK UJI MATERIIL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG**" adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan.

Semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang orisinil. Bila kemudian hari, terbukti skripsi ini adalah plagiat maka saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Jakarta, 10 Agustus 2022



Eka Jazillah

ABSTRAK

**Program Sarjana Universitas Nasional
Program Studi Ilmu Hukum
Skripsi, 26 Agustus 2022**

- A. Nama Penulis Skripsi : Eka Jazillah**
- B. Nomor Pokok Mahasiswa : 183112330040228**
- C. Judul Skripsi : MEKANISME EKSEKUSI PUTUSAN HAK UJI MATERIIL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG**
- D. Jumlah Halaman : 10 hal. dan 93 hal.**
- E. Isi Abstrak :**
Salah satu lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan ialah Mahkamah Agung (MA) di mana berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang seperti tercantum pada Pasal 24A UUD 1945. Permasalahan yang berusaha dijawab pada penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana mekanisme eksekusi putusan Hak Uji Materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang; dan *kedua*, bagaimana kedudukan atau status peraturan perundang-undangan setelah putusan Hak Uji Materiil oleh MA. Penelitian ini pun bertujuan: *pertama*, menganalisis dan mengetahui mekanisme eksekusi putusan Hak Uji Materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang; dan *kedua*, menganalisis dan mengetahui kedudukan atau status peraturan perundang-undangan setelah putusan Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual, serta diuraikan melalui teknik analisis kualitatif. Penelitian ini pun menghasilkan temuan: *pertama*, dalam mekanisme eksekusi hak uji materiil oleh MA masih terdapat sejumlah masalah yakni: (a) pengaturan hak uji materiil hanya semata menggunakan Peraturan Mahkamah Agung; (b) belum jelasnya pengaturan pengiriman naskah kepada termohon dalam hal permohonan diajukan melalui pengadilan negeri perihal aspek administrasi prosedur penanganan perkara; (c) tidak ada pengaturan batas waktu penyelesaian tahapan yang menjadi wilayah kewenangan MA; (d) tidak adanya standar waktu penyelesaian perkara; (e) ketidakpastian waktu dalam hal pemberitahuan putusan kepada para pihak; dan (f) perihal proses pemeriksaan permohonan yang tidak melibatkan para pihak secara langsung dalam persidangan. *Kedua*, kedudukan peraturan setelah dikabulkannya putusan hak uji materiil oleh MA adalah peraturan tersebut tidak sah, tidak berlaku untuk umum, dan memerintahkan pada instansi yang bersangkutan untuk mencabutnya.
Kata Kunci: Mahkamah Agung, Hak Uji Materiil, Peraturan Perundang-undangan.
- F. Daftar Pustaka. : 23 Buku, 8 Peraturan Perundang-undangan, 9 Jurnal, dan 3 Website/Internet**
- G. Nama Dosen Pembimbing : Dr. Ismail Rumadan, M.H.**

ABSTRACT

**National University Graduate Program
Legal Studies Program
Undergraduate Thesis, 26 Agustus 2022**

- A. Writer's Name : Eka Jazillah**
B. Student ID Number : 183112330040228
C. Thesis Title : EXECUTION MECHANISM OF MATERIAL TESTING RIGHTS LEGISLATION REGULATIONS UNDER LAW

- D. Number of Page : 10 pages and 93 pages**
E. Abstract Contents :

One of the institutions that has the authority to test laws and regulations is the Supreme Court which has the authority to examine laws and regulations under the law against the law as stated in Article 24A of the 1945 Constitution. The problems that this research seeks to answer are: (1) how is the mechanism of execution of the decision on the Right to Judicial Review of the laws and regulations under the Act; and (2) what is the position or status of the legislation after the decision on the Right to Material Examination by the Supreme Court. This study also aims to: (1) analyze and find out the mechanism of execution of decisions on the Right to Judicial Review of laws and regulations under the Act; and (2) analyze and find out the position or status of the legislation after the decision on the Right to Material Examination by the Supreme Court. The research method used is normative juridical using statutory, case and conceptual approaches, and described through qualitative analysis techniques. This research also produces findings: first, in the execution mechanism of the right to judicial review by the Supreme Court there are still a number of problems, namely: (a) the regulation of the right to judicial review only uses a Supreme Court Regulation; (b) unclear arrangements for sending manuscripts to the respondent in the event that the application is submitted through a district court regarding the administrative aspects of the case handling procedure; (c) there is no time limit for the completion of stages which are the jurisdiction of the Supreme Court; (d) there is no standard time for case settlement; (e) the uncertainty of the timing of notification of the award to the parties; and (f) regarding the process of examining applications that do not involve the parties directly in the trial. Second, the position of the regulation after the decision on the right to judicial review is granted by the Supreme Court is that the regulation is not valid, does not apply to the public, and orders the relevant agency to revoke it.

Keywords: *Supreme Court, Judicial Review, Regulation*

- F. References :**
23 Books, 8 Legislations, 9 Journals, and 3 Websites
G. Lecture Name Supervisor : Dr. Ismail Rumadan, M.H.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya, penulis dapat menuntaskan penelitian skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Nasional. Dalam memenuhi tugas akhir ini, penulis memilih dan menyusun skripsi dengan judul: **“MEKANISME EKSEKUSI PUTUSAN HAK UJI MATERIL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG”.**

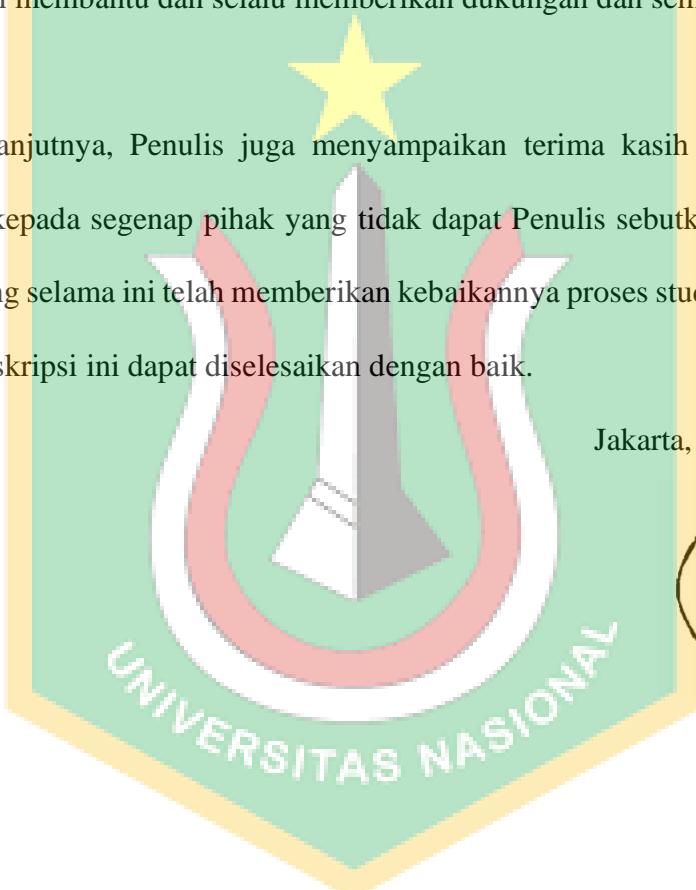
Penulis sadar bahwa masih terdapat kekurangan di dalam penulisan skripsi ini. Oleh karenanya, Penulis membuka diri menerima saran dan kritik dari semua pihak, demi perbaikan di masa mendatang. Dalam menyusun skripsi ini, penulis tentunya mendapat bimbingan, pengarahan dan berbagai saran dari banyak pihak. Karenanya pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa bangga kepada Universitas Nasional dan khususnya kepada Fakultas Hukum yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga. Kemudian, ucapan terima kasih yang tak terhingga pun Penulis haturkan kepada:

1. Bapak Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A., selaku Rektor Universitas Nasional;
2. Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;

3. Bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan waktu, tenaga, dan sumbangsih bagi Fakultas Hukum dan mendukung proses penyusunan skripsi ini secara tulus dan terbuka;
4. Bapak Masidin, S.H, M.H, selaku Kepala Program Studi yang pula telah banyak memberikan waktu luang, arahan, serta turut membimbing Penulis dalam beberapa mata kuliah sejak Semester 1 sampai dengan sekarang;
5. Bapak Ahmad Sobary, S.H., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Nasional yang bagaimanapun juga turut banyak memberikan ilmu, waktu luang, dan membimbing Penulis baik selama berkuliah maupun dalam proses penyusunan skripsi Penulis;
6. Bapak Dr. Ismail Rumadan, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang telah menyediakan waktu, memberi ilmu dan bimbingan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen kami pada Program Studi Ilmu Hukum, Program Sarjana Ilmu Hukum, yang juga telah pula membimbing, memberikan pengajaran serta pengalaman kepada Penulis baik selama studi maupun dalam membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini;
8. Para pimpinan dan staf serta segenap civitas akademik program studi Ilmu Hukum Universitas Nasional;
9. Seluruh sahabat, dan rekan-rekan sesama Mahasiswa pada Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Nasional, yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta dorongan motivasi yang tiada henti dan doa bagi Penulis.

10. Kepada Bapak Bambang Hermanto dan Ibu Rohayati selaku orang tua Penulis dan Ghaitsa Zahira Shifa beserta Muhammad Gifarli Arfi Ramadhan selaku adik kandung yang senantiasa mendukung, memberi motivasi, menginspirasi dan memberi banyak kebaikan bagi Penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Nasional.

11. Kepada Panji Yusrifal, Widya Rahadiyanti, dan Herman Dirgantara, yang telah membantu dan selalu memberikan dukungan dan semangat.



Selanjutnya, Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar tak terhingga kepada segenap pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu yang selama ini telah memberikan kebaikannya proses studi dan penggerjaan penelitian skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Jakarta, 10 Agustus 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eka Jazillah".

Eka Jazillah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori dan Konseptual	11
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN UMUM HAK UJI MATERIIL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG	
A. Mahkamah Agung dan Kekuasaan Kehakiman	26

B. Pengujian Peraturan Perundang-undangan	44
BAB III PROBLEMATIKA KEDUDUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SETELAH MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS HAK UJI MATERIIL	
A. Sifat Putusan Hak Uji Materiil Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang	61
B. Problematika Kedudukan Peraturan Perundang-undangan setelah Mahkamah Agung Memutus Hak Uji Materiil	65
BAB IV MEKANISME EKSEKUSI PUTUSAN HAK UJI MATERIIL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG	
A. Mekanisme eksekusi Putusan Hak Uji Materiil Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang	73
B. Kedudukan Peraturan Perundang-undangan setelah Mahkamah Agung Memutus Hak Uji Materiil	79
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	90